

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022**



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Painan, Januari 2023  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Pesisir Selatan

  
SALIM MUHAIMIN, S.Pd.M.Si  
NIP. 19701107 199702 1003

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1-2
1.2. Dasar Hukum	2-3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN	5
2.1 <i>Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan</i>	5-26
2.2 Sasaran Strategis PK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	26-27
2.3 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.	27-30
BAB III TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN ATAS LKPJ BUPATI PESISIR SELATAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022	31-32
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	33
4.1 Identifikasi tugas Pembantuan urusan Pemerintahan yang diterima dari Pemerintahan tingkat di atasnya	33
4.2 Identifikasi tugas Pembantuan urusan Pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan Pemerintahan tingkat di bawahnya	33
BAB V PENUTUP	34

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran Tahun 2022 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPJ memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang kemudian dibahas oleh DPRD untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, pada Tahun 2022 Bupati Pesisir Selatan berkewajiban untuk menyampaikan LKPJ Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2022 kepada DPRD Kabupaten Sumatera Barat. LKPJ ATA 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disusun berdasarkan Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022. Pelaksanaan kebijakan tersebut tidak terlepas dari perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dan perencanaan tahunan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

LKPJ Bupati Pesisir Selatan ATA 2022 tersebut, selanjutnya akan dibahas oleh DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil pembahasan tersebut diharapkan dapat ditetapkan menjadi keputusan DPRD Kabupaten Sumatera Barat, yang dijadikan sebagai rekomendasi untuk dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumatera Barat.

Berdasarkan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka disusunlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan 2022.

Dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tersebut diharapkan, dapat dilihat dan diukur kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, satu tahun anggaran yang meliputi capaian pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu, laporan ini diharapkan mampu menyajikan pelaporan yang akuntabel, terbuka, transparan dan berlandaskan hukum, sehingga mampu mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan profesional.

## **1.2. Dasar Hukum**

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 yang selanjutnya diubah lagi dengan Peraturan Menteri Tahun 2016;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya dalam mengelola sumber daya dan kemampuan manajerial secara efektif dan efisien yang sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan tujuan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai evaluasi dan upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja

**BAB II**  
**HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**2.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Jumlah Belanja langsung untuk Urusan pendidikan pada tahun 2022 untuk Kegiatan Urusan Pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 605.505.552.009,00 dengan realisasi Rp. 570.032.822.047 dengan tingkat realisasi mencapai angka 95,33% dengan rincian sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN							605.505.552.009	570.032.822.047
1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					460.251.919.530	427.876.389.893
			Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran	1.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					127.595.830	119.008.250



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
			Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;							
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	bulan	12	12	77.113.750	73.650.650
				Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Tersedianya biaya Operasional Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	bulan	12	12	50.482.080	45.357.600
				2.Administrasi keuangan Perangkat Daerah					457.221.459.380	424.942.259.908.50
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Pesisir Selatan	bulan	12	12	457.123.659.380	424.844.459.908,50
				Penyediaan administrasi	Tersedianya Administrasi	bulan	12	12	97.800.000	97.800.000

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				Pelaksanaan Tugas ASN	Pelaksanaan Tugas ASN					
				3.Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah					106.746.480	106.612.450
				Pembinaan,Pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya pembinaan,pengawasan, dan Pengendalian Barang milik Daerah pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab.Pesisir Selatan	bulan	12	12	106.746.480	106.746.480
				4.Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah					551.664.381	522.792.700
				Monitoring,Evaluasi,dan Penilaian Kinerja pegawai	Terbitnya penilaian Angka Kredit(PAK) Pendidik dan tenaga Kependidikan	periode	3	3	190.891.660	187.812.300
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas		kali	1	1	199.254.951	183.051.300

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				dan Fungsi						
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	kali	1	1	58.439.810	55.271.300
				Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	kali	1	1	103.077.960	96.657.800
				5.Administrasi Umum Perangkat Daerah					961.664.909	931.558.727
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab.Pesisir Selatan	bulan	12	12	36.718.330	36.624.000
				Penyediaan Peralatan dan perlengkapan	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor Pada dinas	persen	100	100	35.720.000	35.720.000

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				Kantor	pendidikan dan Kebudayaan kab.Pesisir selatan					
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan Rumah Tangga Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kab.Pesisir Selatan	persen	100	99,91	10.089.000	10.080.000
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistic kantor pada Dinas pendidikan dan Kebudayaan kab.Pesisir Selatan	bulan	12	12	160.998.560	160.989.140
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Pengadaan Pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan kab.pesisir Selatan	bulan	12	12	74.524.519	74.476.140
				Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undngan pada dinas Pendidikan dan kebudayan	bulan	12	12	22.400.000	22.393.000

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
					kab.Pesisir selatan					
				Fasilitas Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya kunjungan Tamu pada dinas pendidikan dan kebudayaan kab.pesisir selatan	bulan	12	12	19.500.000	19.492.000
				Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi pada dinas pendidikan an kebudayaan kabuoaten pesisir selatan	bulan	12	12	420.766.500	420.438.147
				Dukungan pelaksanaan Sistem pemerintahan Berbasis elektronik pada SKPD	Tersedianya data dan Informasi dinas pendidikan dan kebudayaan kab.pesisir selatan	bulan	12	12	180.948.000	151.346.300
				6.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					852.402.180	830.394.581
				Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan	Tersedianya Jasa komunikasi ,Sumber Daya air	bulan	12	12	275.000.000	258.285.521

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				Listrik	dan Listrik pada dinas pendidikan dan kebudayaan kab.Pesisir selatan					
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Pada dinas pendidikan dan kebudayaan kab.pesisir selatan	bulan	12	12	577.402.180	572.109.060
				7.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah					430.386.370	423.763.276
				Penyediaan jasa pemeliharaan,Biaya pemeliharaan,Pajak ,dan perizinan kendaraan dinas Operasional atau lapangan	Tersedianya jasa Pemeliharaan,Biaya pemeliharaan,Pajak ,dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Dinas pendidikan dan kebudayaan kab.pesisir selatan	bulan	12	12	121.946.370	119.673.276
				Pemeliharaan Peralatan dan	Terfasilitasinya Pemeliharaan	bulan	12	12	62.600.000	58.300.000

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				Mesin lainnya	peralatan Mesin Lainnya pada dinas pendidikan dan kebudayaan kab.pesisir selatan					
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terfasilitasinya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung/kantor dan bangunan lainnya pada dinas pendidikan dan kebudayaan kab.pesisir selatan	bulan	12	12	245.840.000	245.790.000
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					143.902.362.033	140.810.406.315
				1.Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					95.950.130.443	95.201.955.140
				Penambahan Ruang Kelas Baru	Terlaksananya Penambahan Ruang Kelas Baru	Persen	100	99,02	1.092.843.020	1.082.157.000
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Terlaksananya pembangunan perpustakaan	Persen	100	100	186.963.000	186.963.000

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
					Sekolah dasar					
				Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya pembangunan sarana,prasarana dan utilitas Sekolah Dasar	Persen	100	99,93	425.459.000	425.155.300
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	persen	100	84,11	1.273.831.274	1.071.423.926
				Rehabilitasi sedang/Berat sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat sarana,prasarana dan utilitas sekolah	persen	100	89,16	635.000.000	566.153.550
				Pengadaan Mebeleur Sekolah	Terlaksananya Pengadaan Mebeleur Sekolah	Persen	100	97,89	1.903.000.000	1.862.772.700
				Pengadaan Perlengkapan Siswa	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Siswa Sekolah Dasar	Persen	100	100	538.200.000	538.200.000
				Penyediaan Biaya personil peserta didik sekolah dasar	Tersedianya Biaya personil Peserta didik	bulan	12	12	3.316.905.640	3.272.795.752



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	Tersedianya Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	Persen	100	92,72	23.563.865.000	23.563.730.400
				Penyelenggaraan Proses Belajar dan ujian bagi peserta didik	Terlaksananya kegiatan AKM SD,Pembuatan master soal ujian bersama SD dan 3 pembuatan konten kreatif materi pembelajaran	bulan	3	3	176.930.000	174.400.150
				Penyiapan dan tindak lanjut Evaluasi satuan pendidikan dasar	Terlaksananya bimtek penguatan pengawas SD dan Penilaian Dokumen KTSP	keg	2	2	25.045.060	22.362.750

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				Pembinaan Minat,Bakat dan Kreatifitas Siswa	Terlaksananya Kegiatan pembinaan minat,bakat dan kreatifitas siswa sekolah dasar berupa festival dan lomba seni siswa nasional (FLS2N) Kompetisi olahraga siswa nasional(KOSN)dan kompetensi sains nasioal(KSN)	bln	3	3	137.394.900	137.209.250
				Penyediaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Bulan	12	12	9.578.439.707	9.202.903.976
				Pengembangan Karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar	Terlaksananya Kegiatan Bimtek Peningkatan Guru SD	keg	3	3	555.120.816	554.744.950
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan	Persen	100	98,96	23.695.970	23.687.270

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				Sekolah	Kelembagaan dan Manajemen Sekolah					
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Tersedianya Dana BOS Sekolah dasar	Persen	100	100	51.068.317.136	51.068.317.136
				Peningkatan kapasitas Pengelolaan dana BOS Sekolah Dasar	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Monitoring pengelolaan dana BOS SD	persen	100	99,98	418.880.920	418.779.030
				Pembangunan Laboratorium Sekoldah Dasar	Terlaksananya Pembangunan Laboratorium Sekoldah Dasar	Persen	100	100	1.030.239.000	1.030.239.000
				2.Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					35.284.783.786	33.879.102.037
				Penambahan Ruang Kelas Baru	Terlaksananya Penambahan Ruang Kelas Baru	persen	100	100	863.000.000	863.000.000
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Terlaksananya Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	persen	100	100	450.000.000	450.000.000

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				Pembangunan perpustakaan sekolah	Terlaksananya Pembangunan perpustakaan sekolah	persen	100	100	315.000.000	315.000.000
				Pembangunan Laboratorium	Terlaksananya Pembangunan Laboratorium	persen	100	100	1.640.000.000	1.640.000.000
				Pembangunan Rumah Dinas Kepala sekolah/Guru/Penjaga sekolah	Terlaksananya Pembangunan Rumah Dinas Kepala sekolah/Guru/Penjaga sekolah	persen	100	100	370.000.000	370.000.000
				Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas sekolah	Terlaksananya Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas sekolah menengah pertama	persen	100	81,62	2.711.919.500	2.213.562.000
				Rehabilitasi Sedang/Berat ruang Kelas Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat gedung Sekolah	persen	100	100	405.000.000	405.000.000
				Rehabilitasi Sedang/Berat sarana,Prasarana dan Utilitas	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat sarana,Prasarana dan Utilitas	persen	100	98,81	540.000.000	533.599.500

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				Sekolah	Sekolah Menengah Pertama					
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan sekolah menengah pertama	persen	100	98,54	22.734.760	22.402.575
				Pengadaan Perlengkapan Siswa	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Siswa	persen	100	97,78	250.000.000	244.458.000
				Penyediaan Biaya Personil Peserta didik sekolah menengah pertama	Tersedianya biaya personil peserta didik sekolah menengah pertama	persen	100	94,20	2.217.940.000	2.089.249.518
				Pengadaan alat Praktik dan Peraga Siswa	Terlaksananya Pengadaan Alat Praktik dan peraga siswa sekolah menengah pertama	persen	100	99,50	692.000.000	688.568.000
				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi peserta didik	Tersedianya soal PTS 1,PAS 1,PTS 2,PAS 2,Ujian Sekolah,Kurikulum Sekolah,Media Pembelajaran,Sosialisasi Assesmen	persen	100	90,66	375.062.612	340.020.830

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
					Nasional					
				Pembinaan Minat ,Bakat dan kreatifitas Siswa	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Minat,Bakat dan Keatiftas siswa menengah Pertama berupa Loma KSN,OGN,UKS/LSS FLS2N,KOSN,Debat Bahasa Indonesia ,Story Telling dan Pra-KSN	persen	100	83,35	171.156.640	142.663.200
				Penyediaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah pertama		Bulan	12	12	417.250.000	389.750.000
				Pengembangan Karir pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Verifikasi Bahan Sertifikasi pendidik,diklat PPG dan pelatihan assesmen dan pemanfaatan teknologi	persen	100	91,85	286.189.070	262.867.200

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
					Pendidikan					
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah menengah Pertama	persen	100	59,77	1.608.584.880	961.469.550
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	persen	100	100	21.865.582.864	21.865.582.864
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Bimbingan teknis dan Monitoring Pengelolaan dana BOS SMP	persen	100	98,26	83.363.460	81.908.800
				3.Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini					9.762.032.524	8.835.447.708
				Pembangunan Gedung/Ruang Kelas /Ruang guru PAUD	Tersedianya sarana peningkatan mutu tingkat PAUD brupa rehabilitasi toilet(jamban) guru beserta sanitasinya,pembangunan area bermain beserta APE luar	persen	100	99,73	369.770.750	368.770.750

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
					ruangan pengadaan alat pemulihan edukatif(APE) dan pengadaan buku koleksi PAUD					
				Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas PAUD	Terlaksananya Pembangunan sarana,Prasarana dan Utilitas PAUD	persen	100	100	235.175.000	235.175.000
				Pengadaan Perlengkapan PAUD	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan PAUD	persen	100	95,21	141.839.250	135.043.000
				Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa PAUD	Terlaksananya Pengadaan alat peraga edukatif (APE)	persen	100	83,61	310.000.000	259.205.140
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan PAUD		Bulan	12	12	36.000.000	31.500.000
				Pengembangan Karir pendidik dan tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan bagi tenaga pendidik PAUD	keg	3	3	297.759.428	297.059.050



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				PAUD						
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Terlaksananya Kegiatan pelatihan pengelolaan DAPODIK PAUD	keg	1	1	75.087.300	73.691.849
				Pengelolaan Dana BOP PAUD	Tersedianya Biaya operasional Non personalia bagi satuan PAUD	persen	100	100	7.982.400.000	7.982.400.000
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Terlaksananya Bimbingan teknis dan Monitoring Pengelolaan dana BOP PAUD	Persen	100	99,26	314.000.796	311.667.919
				4.Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					2.905.415.280	2.893.861.430
				Pembangunan sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Pembangunan sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	persen	100	100	85.000.000	85.000.000
				Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Terselenggaranya Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	persen	100	98,35	150.284.130	147.805.710

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				aan	aan					
				Pengembangan Karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya kegiatan pelatihan penyelenggaraan pendidikan keluarga	keg	3	3	125.030.970	115.955.720
				Pengelolaan Dana BOP Sekolah Monformal/kesetaraan	Tersedianya dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	persen	100	100	2.545.100.000	2.545.100.000
				PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					99.149.870	97.423.500
				1.Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan dasar					99.149.870	97.423.500
				Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal pendidikan dasar	Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal pendidikan dasar	keg	1	1	99.149.870	97.423.500
				PROGRAM					501.200.666	498.177.465

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						
				1. Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah					188.999.830	188.790.450
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Sumber daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Keg	1	1	188.999.830	188.790.450
				2. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota					312.200.836	309.387.015

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Terlaksananya event Kebudayaan Dengan Mengusung Kebudayaan Daerah demi Penguatan budaya Dearah Pesisir Selatan	Persen	100	98,98	312.200.836	309.387.015
				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					564.999.940	564.640.000
				1. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/Kota					564.999.940	564.640.000
				Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga kesenian	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	keg	1	1	564.999.940	564.640.000
				PROGRAM PELESTARIAN DAN					185.919.970	185.784.875

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						
				1. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat kabupaten/Kota					185.919.970	185.784.875
				Perlindungan Cagar Budaya	Terlaksananya Kegiatan Perawatan Cagar Budaya	Persen	100	98,93	185.919.970	185.784.875

## 2.2 Sasaran Strategis PK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Akses Pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	62,92	63,48	110,89
		Program Pengelolaan Pendidikan	APK SD	110,52	101,63	91,95
			APK SMP	86,48	102,28	118,27
			APM SD	99,53	91,27	91,70
			APM SMP	80,43	82,6	102,69

		Program Pendidikan Non Formal	Rata-rata lama sekolah	8,27 Tahun	8,27 Tahun	100
2	Meningkatkan Daya saing Pendidikan	Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Lembaga Pendidik SD dan SMP Akreditasi A	65	11,13	17,12
			Inovasi Pendidikan	1	1	100
3	Revitalisasi Kekayaan budaya, Kearifan local dan sejarah		Jumlah seni budaya yang dilestariakn	3	10	33,3
4	Meningkatnya Benda Cagar Yang Dilestarikan		Jumlah Cagar budaya yang lestari	20	24	120

### 2.3 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Meningkatkan Akses Pendidikan, dengan indikator kinerja yaitu:

1. APK PAUD (Target Kinerja : 62,92%) (Realisasi Kinerja : 63,48 %)

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- ) Program Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan kegiatan sebagai berikut :
  - Kegiatan Pembangunan Gedung/ruang kelas/Ruang Guru Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Reguler 2022), dengan output kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan Ruang Kelas PAUD . Jumlah Dana Rp.369.770.750 dan Terealisasikan Sebesar Rp.368.770.750 ( 99%)
  - Kegiatan pembangunan sarana,Prasarana dan Utilitas PAUD . Jumlah Dana Rp.235.175.000 dan Terealisasikan Sebesar Rp.235.175.000 ( 100%).
  - Kegiatan Pengadaan Perlengkapan PAUD . Jumlah Dana RP.141.839.250 dan Terealisasikan sebesar Rp.135.043.000 (95%)

- Kegiatan Pengadaan alat Parktik dan Peraga Siswa PAUD . Jumlah dana Rp.310.000.000 dan Terealisasikan Sebesar Rp.259.205.140 (83,61%)
  - Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi satuan PAUD. Jumlah Dana Rp.36.000.000 dan Terealisasikan Sebesar Rp.31.500.000 (87,50%)
  - Pengembangan Karir Pendidik dan tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD Sebanyak 4 kali Kegiatan. Jumlah dana Rp.297.759.428 dan Terealisasikan Sebesar Rp.297.059.050(99,76%)
  - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Sebanyak 1 kali.Jumlah Dana Sebesar Rp.75.087.300 dan Terealisasikan sebesar Rp.73.691.849 (100%)
  - Kegiatan pengelolaan Dana BOP PAUD dengan kegiatan ini Tersedianya Biaya Operasional non personalia bagi satuan PAUD Sebanyak 1 Paket. Jumlah dana Sebesar Rp.7.982.400.000 Tersealisasi Sebesar Rp.7.123.335.000 (89,24%)
  - Kegiatan Peningkatan kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah Dana Rp.314.000.796 dan terealisasikan Sebesar Rp.311.667.919 (99,26%)
2. APK SD (Target Kinerja : 110,52%) (Realisasi Kinerja : 101,63%)
  3. APK SMP (Target Kinerja : 86,48%) (Realisasi Kinerja : 102,28%)
  4. APM SD (Target Kinerja : 99,53%) (Realisasi Kinerja : 91,27%)
  5. APM SMP (Target Kinerja : 80,43%) (Realisasi Kinerja : 82,6%)

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- J) Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan kegiatan sebagai berikut :
  - Kegiatan Penambahan Ruang kelas baru dengan jumlah dana Sebesar Rp.1.092.843.020 dan Terealisasikan sebesar Rp.1.082.157.000 (99,02%)
  - Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah,dengan output terlaksananya pembangunan Perpustakaan Sekolah Dasar.Jumlah dana Rp.186.963.000 Dan Terealisasikan sebesar Rp.186.963.000 (100%)
  - Kegiatan pembangunan sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah. Jumlah Dana Rp.425.459.000 dan Terealisasikan Sebesar Rp.425.155.300 (99,93%)
  - Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang kelas Dengan Dana Sebesar Rp.1.273.831.274 dan Terealisasikan Sebesar Rp.1.071.423.926 (84,11%)
  - Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,Prasarana dan Utilitas sekolah Jumlah dana Sebesar Rp.635.000.000 dan Terealisasi Rp.566.153.550 (89,16%)
  - Kegiatan pengadaan Mebel Sekolah,Dengan Output Ini Terpenuhinya meja belajar Sekolah dasar. Jumlah Dana Rp.1.903.000.000 dan Terealisasikan Sebesar Rp.1.862.772.700 ( 97,89%)
  - Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa sekolah dasar Sebanyak 2 Paket. Jumlah dana Rp.538.200.000 dan Terealisasikan Sebesar Rp.538.200.000 (100%)
  - Kegiatan Penyediaan Biaya personil Peserta Didik Sekolah dasar dengan Output Sebanyak 18 sekolah . Jumlah Dana Rp.3.316.905.640 dan Terealisasikan Sebesar Rp.3.272.795.752 ( 98,67%)
- J) Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah menengah Pertama

- Kegiatan Penambahan Ruang Kelas baru dengan dana sebesar Rp.863.000.000 dan Terealisasikan sebesar Rp.863.000.000 ( 100%)
- Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/kepala dengan dana sebesar Rp.450.000.000 dan terealisasikan Rp.450.000.000 ( 100%)
- Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah dengan dana sebesar Rp.315.000.000 dan terealisasikan sebesar Rp.315.000.000(100%)
- Kegiatan Pembangunan laboratorium Sekolah dengan dana sebesar Rp1.640.000.000 dan terealisasikan sebesar Rp.1.640.000.000 (100%)
- Kegiatan Pembangunan Rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah dengan dana sebesar Rp.370.000.000 dan terealisasikan sebesar Rp.370.000.000 (100%)
- Kegiatan Pembangunan sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah Sebanyak 4 Sekolah. Jumlah Dana Rp.2.711.919.500 dan Terealisasikan Sebesar Rp.2.213.562.000 (81,62%)
- Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah dasar dengan dana sebesar Rp.405.000.000 dan terealisasikan sebesar Rp.405.000.000(100%)
- Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan output 9 Sekolah Jumlah dana Sebesar Rp.540.000.000 dan Terealisasi Sebesar Rp.533.599.500 (98,81%)
- Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah,Dengan output ini Terlaksananya pengadaan perlengkapan sekolah menengah Pertama Dengan Dana Sebesar Rp.22.734.760 dan terealisasi Rp.22.402.575 (98,54%)
- Kegiatan Pengadaan perlengkapan siswa dengan dana sebanyak Rp.250.000.000 dan terealisasikan sebesar Rp.244.458.000 (97,78)
- Kegiatan Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah menengah pertama dengan dana Rp.2.217.940.000 dan terealisasikan Rp.2.089.249.518 (94,20%)
- Pengadaan alat Praktik dan Peraga siswa Sekolah Menengah Pertama. Jumlah Dana Rp.692.000.000 dan Terealisasikan sebesar Rp.688.568.000 (99,50%)

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- J Program Pendidikan Non Formal/Kesetaraan, dengan kegiatan sebagai berikut :
  - Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan dana Sebesar Rp.85.000.000 dan terealisasikan sebesar Rp.85.000.000 (100%)
  - Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dengan nonformal/kesetaraan.Jumlah Dana Rp.150.284.310 dan terealisasikan Sebesar Rp.147.805.710 (98,35%)
  - Kegiatan Pengembangan Karir pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebanyak 4 kegiatan dengan dana Rp.125.030.970 dan Terealisasi Sebesar Rp.115.955.720 (92,74%)
  - Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan dengan Dana Sebesar Rp.2.545.100.000 dan Terealisasikan Sebesar Rp.3.076.800.000

Revitalisasi Kekayaan budaya, Kearifan local dan sejarah, dengan indikator kinerja yaitu:

Terwujudnya penguatan dan pelestarian adat serta nilai-nilai tradisional, dengan indikator kinerja yaitu:

- J Program Pengembangan Kebudayaan , Pengelolaan kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah



- Kegiatan Pembinaan sumber daya manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Dengan Output ini terlaksananya kegiatan pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata Kebudayaan dengan dana Rp. 188.999.830 dan Terealisasi sebesar Rp. 188.790.450. (99,89%)
- Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Objek Pemajuan Tradisi Budaya, dengan output ini Terlaksananya event Kebudayaan dengan mengukung kebudayaan daerah demi penguatan budaya daerah Pesisir Selatan dengan Dana sebesar Rp. 312.200.836 dan Terealisasi sebesar Rp. 309.387.015 (99,10%)
- J) Program Pengembangan Kesenian Tradisional dengan output kegiatan Pembinaan kesenian yang masyarakat pelaku dalam daerah kabupaten/kota
- Kegiatan Peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian Tradisional dengan dana sebesar Rp. 564.999.940 dan terealisasi Rp. 564.640.000 (99,94%)
- J) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
- Kegiatan Perlindungan Cagar Budaya, Terlaksananya kegiatan Perawatan Cagar Budaya dengan Dana sebesar Rp. 185.919.970 dan Terealisasi sebesar Rp. 185.784.875 (99,94%)

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan.

Nb.	Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelebihan tenaga pendidik untuk beberapa mata pelajaran serta kekurangan guru untuk mapel lainnya pada satuan pendidikan SMP</li> <li>serta kekurangan tenaga pendidik yang PNS pada satuan pendidikan SD;</li> <li>2. Masih adanya pendidik yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan sarjana S1 khususnya guru SD;</li> <li>3. Kondisi sarana Prasarana Sekolah masih ada yang kurang maupun dalam kondisi rusak</li> <li>4. Keterjangkauan akses masyarakat kurang mampu untuk memperoleh pendidikan bermutu seluas-luasnya;</li> <li>5. Keterbatasan sumber daya dalam mengelolah kebudayaan;</li> <li>6. Keterbatasan akses internet di beberapa kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan guna mendukung Pembelajaran Jarak jauh.</li> </ol>
	Solusi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas pendidikan dan kebudayaan telah melakukan pengusulan mutasi dan rotasi guru melalui BKPSDM kabupaten pesisir selatan</li> <li>2. Dinas pendidikan dan kebudayaan telah memfasilitasi guru yang belum memiliki ijazah S1 untuk kuliah melalui jalur Universitas terbuka (UT) Serta melakukan pengusulan tunjangan kualifikasi melalui kementerian pendidikan kebudayaan ,riset dan Teknologi.</li> <li>3. Dinas pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sekolah melalui anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Maupun Dana APBD pada tahun 2022.</li> <li>4. Salah satu upaya dinas pendidikan dan kebudayaan untuk mempermudah akses pelayanan pendidikan dengan mengusulkan siswa penerima Program Indonesia Pintar (PIP). Serta menyediakan biaya Operasional berupa alat angkutan apung bermotor di kawasan kapo-kapo kecamatan koto XI tarusan untuk memfasilitasi siswa SD maupun SMP untuk bersekolah di sungai nyalo tarusan.</li> </ol>

### BAB III

#### TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN ATAS LKPJ BUPATI PESISIR SELATAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)
1	2	3
1	<p>Sesuai dengan arahan kebijakan dan misi pemerintah daerah dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan menghasilkan manusia beriman, kreatif dan berdaya saing, pemerintah daerah harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan menuju rumah ibadah dan sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan baik yang belum tersentuh pembangunan maupun yang rusak akibat dari bencana seperti a. Pembangunan kembali sekolah dasar seperti SDN 28 Surantih di Kecamatan Sutera dan SDN 02 Teratak Teleng di Kecamatan Bayang Utara yang rusak akibat bencana. b. Perbaiki jembatan yang rusak akibat bencana seperti di Ujung Air Kenagarian Ampiang Parak kecamatan Sutera, dan banyak lagi yang lainnya. c. Perbaiki Jembatan menuju SMP N 05 Satu Atap Sungai Bungin Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batangkapas. d. Perbaiki jalan menuju SMPN 4 Bayang Kenagarian Sawah Laweh yang telah rusak parah.</p>	<p>a. Pembangunan relokasi SDN 28 Pasar Surantih yang terkena bencana abrasi masih terkendala belum tersedianya anggaran pengadaan tanah tetapi kita upayakan pembangunan DAM penahan ombak yang permanen sehingga diharapkan sekolah aman dari terjangan abrasi.</p> <p>b. Memang ditemukan keretakan tanah miring disebelah perpustakaan sekolah dan apabila hujan lebat diduga akan longsor, kita akan upayakan parit miring penahan tebing di anggaran perubahan 2023.</p> <p>c. Bukan Wewenang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.</p> <p>d. Bukan wewenang Dinas pendidikan dan Kebudayaan.</p>
2	<p>Dibidang Pendidikan, DPRD Kabupaten Pesisir Selatan menyarankan pada Pemerintah Daerah melalui jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut : 1) Agar jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran BOS dan BOSDA SD dan SMP, sehingga penggunaannya tepat sasaran untuk menunjang proses belajar mengajar disekolah. 2) Agar tidak ada masalah dikemudian hari agar jajaran dinas pendidikan menertibkan terhadap Sumbangan disekolah yang tidak mengikat,</p>	<p>a. penggunaan dana bos regular diatur permendikbudristek setiap tahunnya dan sekolah dalam menggunakannya diikat dengan aplikasi arkas untuk sekolah dan markas untuk dinas dimana dalam transaksi dinas bisa memantau sekolah serta setiap tahun disdikbud melaksanakan pemeriksaan internal penggunaan bos dan pemeriksaan eksternal oleh inspektorat dan BPK juga penggunaan dana BOSDA dipantau secara ketat dengan cara membentuk tim verifikasi oleh dinas tentang belanja yang sesuai dan tidak sesuai dengan juknis bosda serta SPJ bosda yang kita periksa secara berkala.</p>

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)
1	2	3
	<p>yang telah disepakati oleh komite dan wali murid serta peserta didik. 3) Kedepan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Pesisir Selatan sangat dituntut eksistensi pengawas sekolah, Kepala Sekolah dan guru-guru serta komite sekolah, yang ada ditingkat SD dan SMP termasuk guru penggerak. Sehingga sekolah menghasilkan anak didik yang baik secara kualitas maupun kuantitas di jajaran Dinas Pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan. 4) Untuk meningkatkan kualitas anak didik di sekolah SD dan SMP agar Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan menerapkan kegiatan ekstra kurikuler (menambah jam pelajaran) dan memotivasi lahirnya bimbingan-bimbingan belajar disetiap kecamatan yang ada di Pesisir Selatan. 5) Kondisi hari ini SD dan SMP mobileur banyak tidak layak digunakan oleh SD dan SMP, untuk itu diminta pada Pemerinah Daerah melalui jajaran dinas pendidikan agar dapat melakukan pendataan mobileur yang tidak layak pakai dan agar segera dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun 2022 dan atau pada APBD Tahun 2023 sebagai penunjang proses belajar mengajar di sekolah. 6) Agar Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan dapat menerapkan kembali setiap penerimaan murid baru dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2004</p>	<p>Dan untuk SMP juga sudah dilaksanakan Rekon BOs disekolah sekolah.</p> <p>b. Salah satu tujuan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan pendidikan gratis untuk jenjang SD dan SMP yang menjadi kewenangannya maka dari itu dapat kami pastikan bahwa tidak dibenarkan adanya pungutan apapun dalam penyelenggaraan pendidikan disekolah dan mengeluarkan Edaran tidak diperbolehkan memungut biaya dalam bentuk apapun terhadap peserta didik.</p> <p>c. Eksistensi pengawas, kepsek, dan guru terutama guru penggerak dan kepala sekolah penggerak terus kita tingkatkan dengan cara pemanfaatan PMM (Plafon Mardeka mengajar) dimana PTK kita diharapkan dapat meningkatkan kompetensinya setiap saat demi mewujudkan Profil pelajar Pancasila</p> <p>d. Peningkatan mutu siswa tidak bisa dilepaskan dari mutu proses PBM dan mutu proses kegiatan diluar PBM seperti kegiatan ekstrakurikuler untuk itu kita sudah punya aplikasi yang dinamakan Pronasa (Program Nagari bersekolah) dimana kegiatan ekstrakurikuler atau pengembangan diri siswa itu dipantau atau dikases langsung oleh semua pihak. Di SMP juga sudah dilakukan kegiatan tambahan diluar jam PBM seperti Pramuka, Pembinaan OSN dan O2SN , Tahfidz, FL2SN DLL</p> <p>e. Dinas pendidikan dan Kebudayaan juga sudah melakukan pendataan Mobiler yang tidak layak pakai ke sekolah-sekolah di kabupaten pesisir selatan.</p> <p>f. Setiap Penerimaan Siswa baru Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Melakukan Tes baca Tulis Qur'an dan Praktek bacaan Shalat Wajib.</p>

**BAB IV**  
**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**  
**DAN PENUGASAN**

**4.1 Identifikasi tugas Pembantuan urusan Pemerintahan yang diterima dari Pemerintahan tingkat di atasnya Identifikasi tugas Pembantuan**

Pada tahun 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak ada mendapat dana tugas Pembantuan (TP). Dana Pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi menyalurkan anggaran terkait Pendidikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK Fisik (PAUD,SD dan SMP) maupun DAK Non Fisik (BOS SD,SMP dan BOP PAUD Kesetaraan).

**4.2 Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan Pemerintahan tingkat dibawahnya**

Pada tahun 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp. 53.279.570.036, terdiri dari DAK Paud Rp.254.945.750, DAK SD Rp.30.238.677.974 dan DAK SMP Rp.8.032.406.648. Untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Juga Menerima Sebesar Rp. 154.663.705.000 , terdiri dari BOP PAUD Rp.7.982.400.000, BOP Kesetaraan Rp.2.545.100.000, Tunjangan Guru Rp.141.485.816.000 Penghasilan Guru Rp.1.464.000.000 dan Tunjangan Khusus Guru Rp.1.186.389.000 Selain Dana DAK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sebesar Rp.51.068.317.136 untuk BOS SD dan Rp.21.865.582.864 untuk BOS SMP.

## **BAB V PENUTUP**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2022 (LKPJ) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2022 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2022 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Pesisir Selatan pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2022, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.